

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenanan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan *agent* juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal (*investor*) dengan manajer (*agent*). Manajemen laba muncul sebagai dampak dari teori keagenan (*agency theory*) yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Wahyono, 2012).

Dengan demikian dapat disimpulkan bawah kaitannya *agency theory* dengan manajemen laba, yaitu manajemen perusahaan dalam hal ini adalah manajer dan seluruh karyawan ingin meningkatkan kesejahteraan melalui gaji yang besar dan bonus yang tinggi. Gaji yang besar dan bonus yang tinggi hanya dapat diperoleh ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, oleh karena itu untuk memenuhi kepentingannya, manajemen perusahaan bekerja sama dengan karyawan untuk melakukan manajemen laba. Dengan melakukan manajemen laba yang dilakukan oleh karyawan bagian *accounting* atas perintah manajer maka target yang telah ditentukan pemilik akan tercapai sehingga manajer akan mendapatkan bonus dan manajer dapat

mensejahterahkan seluruh karyawannya dengan bonus yang diterima, karena terdapat persentase bonus yang diterimanya untuk dibagikan kepada seluruh karyawan.

2.2 Manajemen Laba

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Abdillah, dkk (2016), manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak memcerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Rahadi dan Asyik, 2014).

2.2.2 Motivasi Melakukan Manajemen Laba

Motivasi melakukan manajemen laba menurut Wild (2010), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Insentif

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah.

2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi.

2.2.3 Strategi Dalam Melakukan Manajemen Laba

Berdasarkan kutipan dari Rice (2016) diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis strategi manajemen laba, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan Laba (*Increasing Income*)

Perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan.

2. Mandi Besar (*Big Bath*)

Strategi *Big Bath* atau “Mandi Besar” dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, *merger*, atau restrukturisasi. Strategi “*Big Bath*” juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode tertentu baik dengan menciptakan cadangan atau “*bank*” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

2.2.4 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott dalam Rahadi dan Asyik (2014), dinyatakan bahwa pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

2. *Income minimization*

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income minimization* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis.

3. *Income maximization*

Income maximization (maksimisasi laba) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode

2.2.5 Cara Melakukan Manajemen Laba

Menurut Harahap (2013), *Income Smoothing* atau manajemen laba biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur Waktu Kejadian Transaksi

Manajemen dapat menentukan waktu kejadian transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasinya dari waktu ke waktu. Seringkali, waktu yang direncanakan dari terjadinya peristiwa (contoh penelitian dan pengembangan) akan menjadi fungsi dari aturan akuntansi yang mengatur pengakuan akuntansi atas peristiwa.

2. Memilih Prinsip atau Metode Alokasi

Melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantitatif dari peristiwa. Manajemen dapat mengatur pengalokasian suatu biaya selama beberapa periode akuntansi untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan.

3. Perataan Melalui Pengklasifikasian

Manajemen memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal.

2.2.6 Indikator Manajemen Laba

Manajemen laba yang akan diuji dalam penelitian ini adalah manajemen laba tipe *intentionally (designed smoothing)* dan *natural smoothing* dengan menggunakan indeks Eckel menggunakan *coefficient variation* (CV) variabel penghasilan dan variabel penghasilan bersih. Indeks manajemen laba dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Perataan Laba} = \frac{\text{CV}\Delta\text{I}}{\text{CV}\Delta\text{S}}$$

di mana:

ΔS = Perubahan penjualan dalam suatu periode

ΔI = Perubahan laba bersih dalam suatu periode

CV = koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S)

CV ΔI = Koefisien variasi untuk perubahan laba

CV ΔS = Koefisien variasi untuk perubahan penjualan

CV ΔI dan CV ΔS dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{CV}\Delta\text{S dan CV}\Delta\text{I} = \frac{\sqrt{\frac{\sum(\Delta x - \bar{\Delta x})^2}{n-1}}}{\bar{\Delta x}}$$

Di mana,

ΔX = Perubahan laba (I) atau penjualan (S)

$\bar{\Delta\text{X}}$ = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S)

n = Banyaknya tahun yang diamati

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Adapun menurut *Cadbury Committee*, *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Sutikno, 2014).

Bank Dunia dalam Subhan (2012) menyatakan salah satu cara efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan perlu peraturan dan mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian internal yang efektif dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta mampu mengidentifikasi pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, meliputi dewan komisaris, komposisi independen, dan dewan direksi.

2.3.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu (Sutedi, 2011):

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan

perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Fairness* (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

2.3.3 **Manfaat *Good Corporate Governance***

Beberapa manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip dari Sutikno (2014) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan dividen.

2.3.4 Indikator Corporate Governance

Dalam penelitian ini *corporate governance* akan diukur dengan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit. Sebagaimana teori yang menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Maka dalam penelitian ini *corporate governance* akan diukur dengan organ perusahaan yaitu dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutedi (2011).

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Fungsi Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
- c. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- e. Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
- f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan. Semakin besar jumlah anggota Dewan komisaris,

semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris sebagai inti *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Ukuran Dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota Dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Dewan komisaris menjadi dua kategori, yang pertama adalah dewan komisaris independen dan yang kedua adalah dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan controlling shareholders, anggota direksi dan Dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi

dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

Rumus Dewan Komisaris:

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$$

2. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jadi komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris independen akan diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris independen yang ada dalam perusahaan.

Komisaris independen harus dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

- b. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
 2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
 3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
 4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
 5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
 6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain: menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Rumus Komisaris Independen:

$$\text{Komisaris Independen} = \sum \text{Anggota Komisaris Independen}$$

3. Dewan Direksi (*Board Of Director/BOD*)

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif.

Tugas dan fungsi utama Dewan Direksi menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan di-*manage* oleh Direksi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan tugas pokok Dewan Direksi adalah:

- a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perusahaan.
- b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud, tujuan perusahaan dan demi kepentingan perusahaan.
- c. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihakpihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya

memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Rumus Dewan Direksi:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

4. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok komite yang dipercayai untuk melakukan audit internal dalam perusahaan. Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ketua komite audit bertanggungjawab penuh kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan berkala. Komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan:

- a. Laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan transparan.
- b. Dalam melaksanakan audit (eksternal maupun internal) telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.
- c. Pengendalian perusahaan telah dilaksanakan dengan maksimal.
- d. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- e. Menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen.

Komite audit terdiri sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite Audit memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan pengawas Internal (SPI) maupun auditor eksternal sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur penelaahan yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN kepada pemegang saham, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi atau ramalan, dan informasi keuangan lainnya.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas sepanjang masih berada dalam lingkungan tugas dan kewajiban komisaris atau dewan pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rumus Komite Audit:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah dapat dilihat pada tabel 2.1.

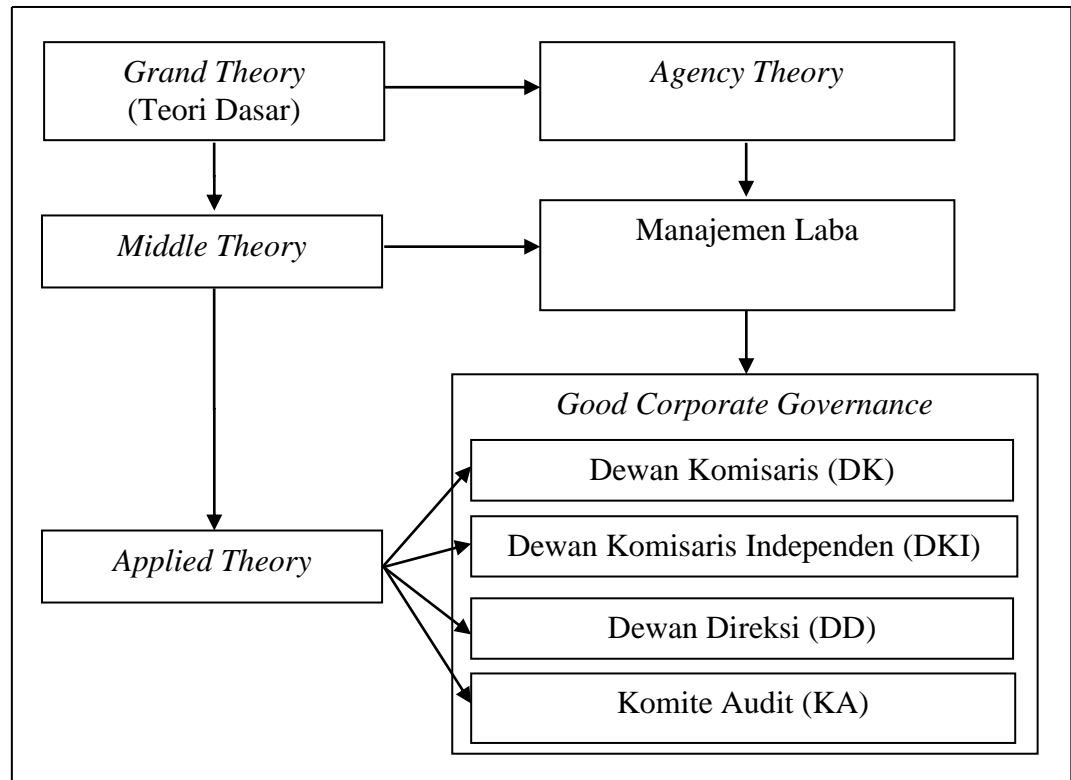
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Firmansyahrez, Dudi dan Siska (2016)	Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)	Variabel Bebas: Komisaris Independen dan Komite Audit Variabel Terikat: Manajemen Laba	Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
2	Nabila dan Daljono (2013)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba	Variabel Bebas: Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Reputasi Auditor Variabel Terikat: Manajemen Laba	Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Komite Audit dan Reputasi Auditor Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
3	Oktaviani (2016)	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2014	Variabel Bebas: Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Variabel Terikat: Manajemen Laba	Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil
4	Herlambang dan Darsono (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Variabel Bebas: Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Variabel Terikat: Manajemen Laba	Ukuran Dewan Komisaris dan Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Komposisi Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
5	Kristiani, Sulindawati dan Herawati (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Variabel Bebas: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Variabel Terikat: Manajemen Laba	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
6	Kusumaningtyas (2014)	Pengaruh Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba	Variabel Bebas: Ukuran Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Variabel Terikat: Manajemen Laba	Ukuran Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
7	Rahadi dan Asyik (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia	Variabel Bebas: Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Transparansi Komite Audit Variabel Terikat: Manajemen Laba	Ukuran Dewan Direksi, Kualitas Audit dan Transparansi Komite Audit Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, sedangkan Ukuran Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

2.5 Kerangka Teori

Berikut adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Dalam *grand theory* menggunakan *agency theory* dikarenakan *agency theory* menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga muncullah konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal (*investor*) dengan manajer (*agent*).

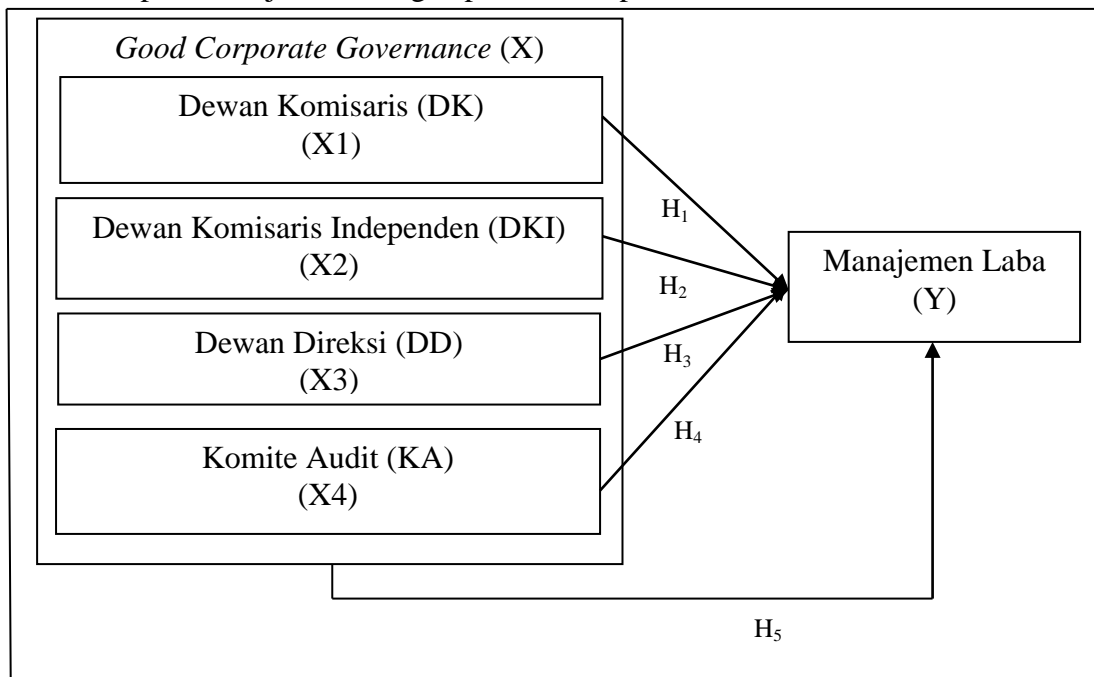
Dalam *middle theory* menggunakan manajemen laba karena manajemen laba muncul sebagai dampak dari teori keagenan (*agency theory*) yang

terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*).

Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu *applied theory* yang digunakan adalah *good corporate governance*, yaitu sebagai pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

2.6 Kerangka Pikir

Berikut penulis sajikan kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

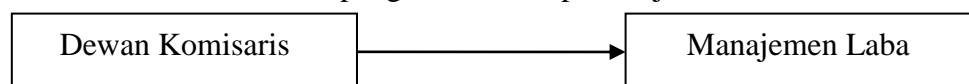
Berdasarkan gambar 2.2 maka diketahui bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit, sedangkan variabel terikatnya adalah manajemen laba.

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Menurut Sutedi (2011), Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjebatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan. Semakin besar jumlah anggota Dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiani, Sulindawati dan Herawati (2014), menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen laba dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris, sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

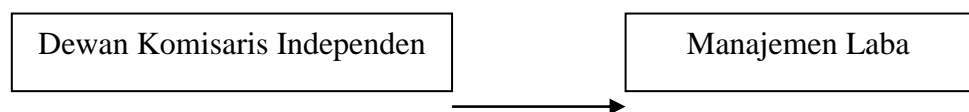


2.7.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Menurut Sutedi (2011), Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jadi komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyahrez, Dudi dan Siska (2016), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen laba dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris independen sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen

laba

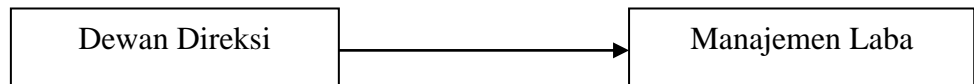


2.7.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba

Menurut Sutedi (2011), Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif. hasil penelitian yang dilakukan oleh rahadi dan asyik (2014), menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh keberadaan dewan direksi dalam perusahaan sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

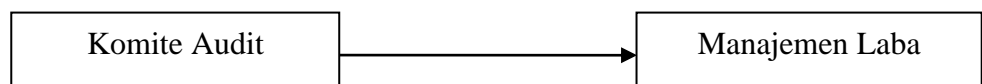
H₃: Dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba



2.7.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Menurut Sutedi (2011), Komite audit adalah sekelompok komite yang dipercayai untuk melakukan audit internal dalam perusahaan. Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ketua komite audit bertanggungjawab penuh kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan berkala. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2014), menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba



2.7.5 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Adapun menurut *Cadbury Committee*, *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Sutikno, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014). Dalam penelitiannya diketahui bahwa *good corporate governance* dapat mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan sebesar 22,4%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. *Good corporate governance* yang baik dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi tindakan manajemen laba sehingga dapat dirumuskan hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅ : *Good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba

